

PERSEPSI PEMUDA TENTANG KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN KOTA SAMARINDA

Fitri Adi¹, Adam Idris², Fajar Apriani³

¹Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

²Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Korespondensi: adi.fitri294@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the attention of the government in the Samarinda City unemployment reduction, youth perceptions about the pre-work card policy in the City of Samarinda unemployment reduction and the implications of the pre-work card policy in the City of Samarinda unemployment reduction. This type of research used in this study is a combination research method with a concurrent embedded model, data analysis using descriptive statistical method. The results showed that the government has the role of community empowerment and in preparing workforce that is ready to use by providing experience and skills. Youth in Samarinda City are dominantly aware of the pre-work card policy with the main source of information through electronic media. The majority of Samarinda City's youth perceptions stated that they quite agree on the pre-work card policy. Samarinda City's youth perception about the implications of the pre-work card policy states that it is quite capable of dealing with youth unemployment.*

Keyword: *Pre-work Card Policy, Unemployment Reduction, Youth Perception*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhatian pemerintah dalam penanggulangan pengangguran Kota Samarinda, persepsi pemuda tentang kebijakan kartu prakerja dalam penanggulangan pengangguran Kota Samarinda dan implikasi kebijakan kartu prakerja dalam penanggulangan pengangguran Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi dengan model concurrent embedded, analisis data menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran pemberdayaan masyarakat dan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai dengan memberikan pengalaman dan keterampilan. Pemuda di Kota Samarinda dominan mengetahui tentang kebijakan kartu prakerja dengan sumber utama informasi melalui media elektronik. Persepsi pemuda Kota Samarinda mayoritas menyatakan cukup setuju tentang kebijakan kartu prakerja. Persepsi pemuda Kota Samarinda tentang implikasi kebijakan kartu prakerja menyatakan cukup mampu dalam mengatasi pengangguran usia muda.*

Kata Kunci: *Kebijakan Kartu Prakerja, Penanggulangan Pengangguran, Persepsi Pemuda.*

Pendahuluan

Hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mampu menampung angkatan kerjanya. Bukan hanya negara berkembang yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja, namun juga negara-negara maju. Seluruh warga negara Indonesia selayaknya dijamin haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun sampai saat ini masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi sebagian masyarakat Indonesia masih terus menjadi persoalan mendasar, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini telah diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja penting dilakukan mengingat peran sertanya dalam pembangunan nasional. Informasi ketenagakerjaan diperlukan dalam proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Semakin lengkap dan akurat informasi ketenagakerjaan yang tersedia, maka perencanaan pembangunan akan semakin jelas dan tepat sasaran.

Pembangunan ketenagakerjaan tidak terlepas dari pembangunan kepemudaan. Pemuda memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, termasuk diantaranya memasuki usia kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia yang masuk kategori pemuda pada Februari 2019 mencapai 37.823.164 orang yang dimana sebanyak 4.553.580 orang menjadi pengangguran terbuka, sebanyak 2.129.868 orang pernah bekerja dan 2.423.712 orang tidak pernah bekerja sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2019). Pemuda memiliki potensi yang lebih besar dalam melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Beberapa kebijakan perlu dikeluarkan untuk tenaga kerja pemuda, diantaranya pemberian pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja pemuda pada sektor-sektor penting yang sesuai dengan kondisi pemuda.

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang berada dalam transisi perkembangan antara umur 15 sampai 30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda perkembangan dari remaja menuju dewasa, dengan karakteristik yang dinamis, bergejolak, namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan bagi pemuda untuk mewujudkan pemuda yang berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tanpa upaya-upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, maka bentuk pemuda yang dilahirkan akan bersifat pasif, atau pemuda itu tidak bersifat aktif seperti yang diharapkan.

Pemerintah telah memasukkan program kartu prakerja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Tujuan Program Kartu Prakerja yaitu mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Penerima program kartu prakerja dibagi menjadi dua desain implementasinya berdasarkan akses pelatihannya. Yakni, akses digital dan akses reguler (tatap muka). Untuk akses digital, nantinya mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan pelatihan. Sedangkan reguler, pelatihan dan sertifikasi akan dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah. Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan sesuatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Perlu diperhatikan bahwa setiap keputusan menuntut penafsiran dan evaluasi

terhadap informasi. Karena itu, data yang diterima perlu disaring, diproses, dan ditafsirkan. Misalnya, data mana yang relevan dengan pengambilan keputusan. Persepsi dari pengambil keputusan akan ikut menentukan hal tersebut, yang akan mempunyai hubungan yang besar pada hasil akhirnya. Kebijakan publik oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan yang akan diimplementasikan tersebut harus mendapatkan dukungan dari publik, keterlibatan publik yang lebih tinggi dalam proses pembentukan kebijakan, semakin tinggi rasa memiliki dan dukungan publik untuk kebijakan, sehingga mendorong penerapan dan penegakan kebijakan yang efektif dan mengurangi resiko implementasi.

Perencanaan tenaga kerja oleh pemerintah perlu melihat faktor-faktor penyebab adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan persediaan tenaga kerja dan penyajian pilihan pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan program aksi, sebagai bagian dari proses perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penelitian akan dinamika ketenagakerjaan diperlukan agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhatian pemerintah dalam penanggulangan pengangguran Kota Samarinda, untuk mengetahui persepsi pemuda tentang kebijakan kartu prakerja dalam penanggulangan pengangguran Kota Samarinda dan untuk menganalisis implikasi kebijakan kartu prakerja dalam penanggulangan pengangguran.

Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Menurut Suharto (2006:7), istilah kebijakan dipadankan dengan kata bahasa Inggris '*policy*' yang dibedakan dari kata '*kebijaksanaan*' (*wisdom*) maupun '*kebajikan*' (*virtues*). Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambil keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (dalam Suharto, 2006:7) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun mentaati (yang terkena kebijakan tersebut). Titmuss (dalam Suharto, 2006:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengertian kebijakan publik menurut Dye (dalam Mulyadi, 2015:36) adalah "*Whatever government choose to do or not to do*". Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Easton (dalam Mulyadi, 2015:36) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik dalam arti lainnya adalah merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang dilaksanakan secara jelas.

Kebijakan secara umum menurut Abidin (dalam Mulyadi 2015:38-39) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : (1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif atau yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan umum sebagai contoh yaitu kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional, wewenang (Presiden bersama-sama

dengan DPR dan DPD) dan bentuknya UUD/UU/Perpu, (2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-Undang. Kebijakan pelaksanaan sebagai contoh yaitu kebijakan Presiden sebagai pelaksana UU, TAP MPR dan Perpu guna mencapai tujuan, wewenang (Presiden), dan bentuknya PP/Kepres/Inpres, (3) Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Kebijakan teknis sebagai penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Wewenang adalah Menteri dan pejabat setingkat Menteri/LNPK, bentuknya adalah keputusan, peraturan dan instruksi pejabat tertentu

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan berasal dari kata dasar tenaga kerja, ditambah awalan “ke” dan akhiran “an”. Dengan demikian ketenagakerjaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pasal 2 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun (Asyhadie dan Kusuma, 2019:1).

Secara umum pengangguran diartikan keadaan yang menunjukkan suatu sumberdaya yang tidak digunakan (Hasyim, 2016:197-203). Pengangguran berdasarkan cirinya dapat dibagi menjadi empat golongan yaitu: (1) Pengangguran terbuka (*Open Employment*) yaitu meningkatnya jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan lowongan pekerjaan mengakibatkan dalam perekonomian semakin banyak jumlah angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula terwujud sebagai akibat dari lesunya kegiatan perekonomian yang membawa kegiatan menurunnya produksi di berbagai bidang karena pengurangan tenaga kerja, (2) Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*), di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat menjalankan kegiatan dengan efisien, sehingga terjadi pengangguran, (3) Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*). Pengangguran seperti ini terutama terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Saat cuaca kurang baik apabila nelayan dan petani tidak dapat melakukan pekerjaannya dan tidak melakukan pekerjaan lain, 4) Setengah Menganggur (*Underemployment*). Pekerja yang hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari digolongkan sebagai setengah menganggur.

Pemuda

Pemuda berdasarkan usia dan pemuda berdasarkan karakternya. Dengan demikian, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemuda adalah generasi penerus bangsa yang berada dalam transisi perkembangan antara umur 15 sampai 30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda perkembangan dari remaja menuju dewasa, dengan karakteristik yang dinamis, bergejolak, namun belum

memiliki pengendalian emosi yang stabil. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan bagi pemuda untuk mewujudkan pemuda yang berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tanpa upaya-upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, maka bentuk pemuda yang dilahirkan akan bersifat pasif, atau pemuda itu tidak bersifat aktif seperti yang diharapkan.

Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses yang memungkinkan kita mengorganisir informasi dan menginterpretasikan kesan terhadap lingkungan sekitarnya (Wibowo, 2014:60). Menurut Thoha (2010: 143-147), persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan penciuman. Persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang kenyataan yang barang kali berbeda dari kenyataannya. Persepsi terjadi melalui suatu proses, dimulai ketika dorongan diterima melalui pengertian kita. Kebanyakan dorongan yang menyerang pengertian kita disaring, sisanya diorganisir dan diinterpretasikan. Proses yang menyertai pada beberapa informasi yang diterima oleh pikiran kita dan mengabaikan informasi lainnya dinamakan *selective attetion* atau *selective perception*. *Selective attetion* dipengaruhi oleh karakteristik orang atau objek yang dipersepsikan, terutama besaran, intensitas, gerakan, pengulangan dan keaslian. *Selective attention* dipicu oleh sesuatu atau orang yang mungkin di luar konteks, seperti mendengar seseorang berbicara dengan akses asing, model proses persepsi tersebut digambarkan oleh McShane dan Glinow (dalam Wibowo, 2014:61-62)

Persepsi dibentuk oleh tiga faktor yaitu: (1) *perceiver*, orang yang memberikan persepsi, (2) target, orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi dan (3) situasi, keadaan pada saat persepsi dilakukan. Faktor *perceiver* mengandung komponen: (a) *attitudes* (sikap), (b) *motives* (motif) (c) *interests* (minat dan kepentingan), (d) *experience* (pengalaman) dan (e) *expectations* (harapan). Faktor target mengandung komponen (a) *novelty* (sesuatu yang baru), (b) *motion* (gerakan) (c) *sounds* (suara), (d) *size* (besaran atau ukuran), (e) *background* (latar belakang), (f) *proximity* (kedekatan) dan (g) *similarity* (kesamaan). Sedangkan faktor situasi mengandung komponen: (a) *time* (waktu), (b) *work setting* (pengaturan kerja) dan (c) *social setting* (pengaturan sosial).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi dengan model *concurrent embedded* (campuran tidak berimbang). Lokasi tempat penelitian ini dilakukan adalah di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No. 78, Pelabuhan, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan mulai Februari hingga Mei 2020. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian diperoleh melalui informan yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Serikat Pekerja dan pencari kerja (responden) dalam menjawab angket yaitu hasil wawancara dengan

para pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, (2) Data sekunder (*secondary data*) diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian dari berbagai badan atau lembaga yang relevan dalam masalah penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Perhatian Pemerintah dalam Penanggulangan Pengangguran Kota Samarinda

Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia muncul dari para penganggur itu sendiri, misalnya dari aspek tingkat pendidikan yang rendah. Penganggur berkualifikasi pendidikan tinggipun, sering dihadang oleh kesempatan kerja yang sangat terbatas. Bahkan, banyak diantara mereka yang bekerja pada posisi yang sebetulnya bisa diisi oleh mereka yang berpendidikan rendah atau menengah. Kondisi seperti ini memunculkan fenomena *mismatch*, yaitu angkatan kerja yang bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Selain karena sulitnya lapangan pekerjaan, persoalan pengangguran semakin bertambah dengan munculnya penganggur baru, yaitu mereka yang baru lulus dan kemudian ikut meramaikan pasar kerja.

Beberapa faktor pengangguran usia muda karena waktu tunggu memperoleh pekerja antara lain karakteristik individu seperti: jenis kelamin, umur, tempat tinggal, tingkat pendidikan, pendidikan teknis, mencari pekerjaan, dan jenis pekerjaan yang dicari. Terbatasnya lapangan kerja, ditambah dengan kurangnya tenaga terampil yang berorientasi pasar, mengakibatkan kaum muda sulit mendapat pekerjaan dan pada akhirnya terjebak dalam lingkaran pengangguran dan kemiskinan yang sangat sulit diputus. Pengangguran terdidik sebagai bentuk dari ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja) dan kesempatan kerja yang tersedia (sisi permintaan tenaga kerja). Lebih jauh lagi, ketidakcocokan ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status, atau masalah keahlian khusus. Kesulitan memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya.

Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan pelayanan terhadap tenaga kerja dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai sebagai hasil kerjasama dengan lembaga-lembaga latihan yang ada. Melalui pelatihan keterampilan yang identik dengan latihan kerja menekankan pada keterampilan yang disebut profesionalisme. Pelatihan dalam masyarakat memberikan pengalaman, keterampilan, dan penghayatan terhadap peran dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Latihan kerja akan terus diperlukan karena dunia kerja dan persyaratan kerja terus berkembang dan berubah dengan cepat.

Persepsi Pemuda terhadap Kebijakan Kartu Prakerja

Pengetahuan Pemuda tentang Kebijakan Kartu Prakerja bahwa pemuda (yang diwakili oleh responden penelitian ini) pada umumnya memiliki pengetahuan akan kebijakan kartu prakerja. Secara umum pengetahuan pemuda Kota Samarinda tentang Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat yang ingin

memiliki atau meningkatkan keterampilannya dengan membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung oleh masyarakat dan menjadi pelengkap dari pendidikan formal. Penerima kartu prakerja juga memperoleh subsidi perbulan untuk membantu para pengangguran selama mencari kerja.

Media Informasi Pemuda tentang Kebijakan Kartu Prakerja yang menjadikan pemuda (yang diwakili oleh responden penelitian) mengetahui tentang kebijakan kartu prakerja mengetahui melalui media elektronik. Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi memberikan pengaruh masyarakat dalam menerima informasi. Informasi yang dipercaya dapat diperoleh berdasarkan pada kepercayaan yang dimiliki oleh sumber informasi atau reputasi sumber informasi.

Persetujuan Pemuda tentang Kebijakan atas Kartu Prakerja (yang diwakili oleh responden penelitian) atas kebijakan kartu prakerja pada umumnya cukup setuju dengan kebijakan kartu prakerja untuk mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan oleh pemuda. Kebijakan kartu prakerja secara umum mendapat respon yang positif dari pemuda (yang diwakili oleh responden penelitian) yang menyatakan bahwa kartu prakerja melalui program penguatan kemampuan kerja (*skill*) adalah program yang baik.

Persepsi Kartu Prakerja Mampu Mengatasi Pengangguran Usia Muda

Persepsi terhadap kemampuan kebijakan kartu prakerja dalam mengatasi pengangguran usia muda bahwa keyakinan pemuda (yang diwakili oleh responden penelitian) pada umumnya cukup mampu. Secara umum keyakinan pemuda (yang diwakili oleh responden penelitian) mampu mengatasi sulitnya kaum muda mencari pekerjaan, seperti kualifikasi pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu sehingga tenaga kerja dituntut memiliki kemampuan (*skill*) yang dibutuhkan dan berpengalaman. Melalui kebijakan kartu prakerja untuk mampu mengena terhadap inti dari permasalahan serta memberi harapan bagi masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Permasalahan kualitas sumber daya manusia muncul dari *Mismatch* yaitu tenaga kerja yang bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan pendidikannya karena sulitnya lapangan pekerjaan. Pemerintah memiliki peran pemberdayaan masyarakat dan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai sebagai hasil kerjasama dengan lembaga-lembaga latihan yang ada. Pemuda di Kota Samarinda dominan mengetahui tentang kebijakan kartu prakerja dengan sumber utama informasi melalui media elektronik. Persepsi pemuda Kota Samarinda mayoritas menyatakan cukupsetuju tentang kebijakan kartu prakerja. Pemuda Kota Samarinda memiliki persepsi bahwa kebijakan kartu prakerja akan cukup mampu mengatasi pengangguran usia muda sebab akan mengatasi kesulitan kaum muda mencari pekerjaan yang disebabkan misalnya karena adanya kualifikasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja berpengalaman yang seringkali mematahkan semangat kaum muda untuk memasuki pasar kerja.

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah: (1) Diharapkan terciptanya iklim usaha, keamanan, kestabilan, kebijakan, dan peraturan perundangan yang lebih baik untuk perlindungan dan kesenjangan tenaga kerja dikarenakan masalah ketenagakerjaan mempunyai kaitan yang luas di tingkat lokal maupun nasional, (2) Diharapkan penyaluran program kartu prakerja dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga tujuan

kebijakan dalam permasalahan kesenjangan tenaga kerja antara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja serta mendorong peningkatan keterampilan dapat tercapai

Daftar Pustaka

Sumber Literatur:

- Asyhadie, Zainal & Kusuma Rahmawati. 2019. Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia. Prenadamedia Group. Jakarta
- Muchlas, Makmuri. 2005. Perilaku Organisasi. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Sarwono, Sarlito W. 2009. Psikologi Sosial. Salemba Humanika: Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Sosial: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. CV. Alfabeta. Bandung
- Susilo, Dwi Agus. 2012. Pera Pemuda dalam Ketahanan Nasional Lembaga Jangka Indonesia: Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan Kesatu. Alfabeta: Bandung.
- Thoha, Miftah. 2010. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Wibowo. 2014. Perilaku dalam Organisasi. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Sumber Internet:

- Badan Pusat Statistik. 2019. Tenaga Kerja. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>. 15 November 2019

Peraturan:

- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kepemudaa